

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak principal. Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami Corporate Governance. Teori keagenan adalah suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antara anggota-anggota dalam perusahaan, yakni pemilik dan agen sebagai pelaku utama (Jensen dan meckling,1976 dalam Ujiyanto dan Pramuka,2007). Teori keagenan mengakibatkan hubungan asimetris tersebut diperlukan suatu konsep Good Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi sehat. (Jense dan Meckling 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (principal) meminta kepada orang lain (agent) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan principal, dengan cara mendelegasikan otoritas kepadanya. Principal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelola perusahaan terhadap pihak manajemen. Permasalahan keagenan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diatasi dengan diterapkannya Good Corporate Governance (GCG), GCG dalam hal ini berperan penting dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bagi pemegang saham, GCG memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan baik dan akan memberikan returns yang memadai. Pihak principal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Agen adalah pihak yang mengelola perusahaan seperti manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Hubungan keagenan merupakan hubungan kontrak antara principal yang memperkerjakan agent tersebut untuk membuat keputusan yang baik bagi principal (Jensen dan mekling,1976 dalam prasetya,2012). Namun

adanya perbedaan kepentingan antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manajer) menyebabkan munculnya masalah baru. Pemberian wewenang ini dan tanggung jawab principal kepada agent membuat pemilik perusahaan tidak dapat mengawasi kinerja manajer, sehingga keputusan manajer kadang tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengarah pada tindak kecurangan dan penipuan yang dilakukan agent terhadap principal (Jensen dan Mekling, 1976 dalam Widadgodan Chariri 2014). Maka didalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda dimana principal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan, sedangkan agent yang mendapat tanggung jawab dalam mengelola suatu perusahaan ingin memperoleh imbalan yang besar. Dengan maksud untuk kepentingan agent itu sendiri. Suatu pandangan yang dibangun melalui teori agensi adalah anggapan mengenai sikap individualistis pada setiap orang yang akan memicu perbedaan kepentingan antara principal dan agent (yulio,2016). Teori keagenan menyatakan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan perusahaan dalam bentuk GCG, akan mampu mengurangi konflik kepentingan dan asimetris informasi untuk meredam perbedaan kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan. (Tirtasari & Hartomo,2019).

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab social dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi dapat menyebabkan perusahaan terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan dengan meningkatkan penilaian didalam perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak publik (Deegan dan Brown, 1996). Perusahaan dapat menyadari adanya kelangsungan hidup dalam perusahaan adanya ketergantungan dari hubungan setiap perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya dimana perusahaan itu beroperasi. Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan legitimacy theory yang mengakui bahwa didalam perusahaan memiliki kontrak dengan

masyarakat dalam melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapinya sebagai bentuk kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994 dalam Titisari, Suwardi, dan Setiawan, 2010). Legitimacy theory menyatakan bahwa adanya organisasi yang harus melakukan dan mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka telah melakukan kegiatan untuk batasan didalam norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2011). Dowling dan pfeffer (1997, p. 122) dalam Chariri (2008) menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai social yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem social masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika tidak selaras aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Suaryana (2011) menyatakan adanya norma perusahaan yang berubah mengikuti seiring berubahnya waktu, dari waktu ke waktu untuk perusahaan yang mengikuti segala perkembangan. Usaha didalam perusahaan adanya perubahan yang mendapatkan atau legitimasi yaitu suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Teori legitimasi dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut dapat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari perusahaan kecil (Cheers, 2011). Legitimasi diakui sebagai bentuk kinerja didalam perusahaan yang sesuai dengan nilai social. Teori legitimasi menyatakan kinerja lingkungan yang lemah meningkatkan ancaman legitimasi social perusahaan dapat mendorong suatu perusahaan tersebut untuk melakukan pengungkapan didalam laporan tahunan perusahaan. Teori ini berdasarkan adanya pandangan terhadap adanya kontrak social didalam perusahaan dan lingkungan sekitar yang menurut perusahaan dapat melaporkan kegiatan secara sukarela. Legitimasi dikatakan menjadi krusial bagi suatu perusahaan dimana legitimasi didalam masyarakat dikatakan sebagai faktor yang menentukan perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. (Karim, 2016). (Tirtasari & Hartomo, 2019).

2.3 Korupsi

Korupsi menurut peraturan perundangan-undangan yaitu terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UUPTPK no. 31 Tahun 1999: “ Setiap orang yang secara langsung melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain baik suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “. Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999 “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri baik orang lain maupun suatu koperasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara “. Dengan demikian dapat disimpulkan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi adalah “ perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pada pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya “.

2.4 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) Menurut Agoes (2011:101) yaitu “ Tata kelola perusahaan yang baik yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Dewan Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. GCG juga dikemukakan oleh Kurniawan (2012:27) adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholder-stakeholder lainnya. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdapat lima asas GCC yakni (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Responsibilitas, (4) Independensi, (5) Kewajaran dan Kesetaraan.

Upaya anti korupsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya mengakibatkan meningkatnya efisiensi, dan menjamin keberlanjutan namun juga berfungsi sebagai alat anti korupsi yang efektif (Sullivan et al, 2013). Dalam penelitian ini ada 2 elemen GCG yang akan dibahas yakni (1) Komisaris Independen, (2) Keberagaman Gender dalam anggota komisaris.

2.5 Komisari Independen

Komisaris Independen adalah Komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Syarat komisaris Independen antara lain adalah tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang diatur dalam anggaran dasar. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 1 ayat 3 disebutkan Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Independensi yang dimiliki Dewan Komisaris di harapkan mampu menghadirkan pengawasan yang efektif dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*.

2.6 Kompetensi Komite Audit

Komite Audit merupakan sekelompok orang yang dipilih untuk suatu kelompok adanya lebih besar yang dikerjakan oleh pekerjaan tertentu yang dapat melakukan tugas-tugasnya dengan khusus dengan sejumlah anggota dewan komisaris yang ada didalam perusahaan klien yang dapat bertanggung jawab untuk membantu auditor didalam mempertahankan independensi didalam manajemen (Tugiman,2014). Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Komite Audit yaitu suatu bentuk komite yang ber-anggota dewan komisaris yang didapat meminta kalangan luar dengan berbagai suatu keahlian,

pengalaman, yang berkualitas lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Kompetensi komite audit di bidang akuntansi ataupun keuangan tertentu akan mempermudah tugasnya untuk melakukan pemantauan agar meminimalkan resiko kecurangan dalam perusahaan dalam rangka menciptakan asas transparansi.

2.7 Struktur Kepemilikan Institusional

Menurut Gumilang, dkk (2015) Kepemilikan institusional yaitu suatu bentuk keadaan dimana struktur kepemilikan saham mayoritas adanya perusahaan yang memiliki sebuah lembaga seperti, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, koperasi, institusi pemerintah dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dan untuk meminimalisir konflik keagenan yang ada diantara manajer dengan pemegang saham (Jensen & Meckling,1976). Sehingga dapat dikatakan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap bagaimana komitmen perusahaan terhadap anti Korupsi. (Tirtasari&Hartomo, 2019).

2.8 Keberagaman Gender

Menurut Muhtar (2002), Gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran social berdasarkan jenis kelamin. Sementara (Fakih , 2008:8) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social dan kultural. Gender menunjukkan adanya perbedaan karakter laki-laki dengan perempuan sesuai konstruksi social budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Sehingga hal ini akan mempengaruhi perbedaan pengambilan keputusan dan juga dalam pengaruhnya pada perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi. Pada intinya perempuan dapat dikatakan lebih memiliki sikap berhati-hati dan tidak ingin mengambil suatu risiko yang membuat keputusan yang dapat diambil nilainya cukup tepat dan rendah risiko. Dengan adanya dewan komisaris perempuan

didalam jajaran sebuah anggota komisaris tersebut akan mempengaruhi bagaimana upaya perusahaan untuk mencegah korupsi.

2.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang mempertimbangkan adanya suatu nilai didalam perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan juga dapat mencerminkan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, berarti asset yang dimiliki perusahaan pun semakin besar. Menurut (Riyanto, 2011:299), suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas, saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan besar akan mendapat perhatian dari stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya karenan perusahaan tersebut dianggap telah berhasil menjalankan bisnisnya dan berhasil membangun image serta kepercayaan publik. Menurut UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2008, menyebutkan bahwa ada 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan asset yang dimiliki oleh perusahaan yakni (1) Perusahaan ukuran mikro, (2) Perusahaan kecil, (3) Perusahaan ukuran menengah, dan (4) Perusahaan besar.

2.10 Risiko Industri

Risiko adalah ketidak tentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (Abas Salim). Resiko adalah ketidak pastian atas terjadinya suatu peristiwa (soekarto). Karakteristik dan risiko yang berbeda pula terhadap praktik korupsi. Risiko dibedakan menjadi dua, yaitu industri high risk dan industry low risk, dalam jurnal Healy dan Serafeim (2011) menyatakan bahwa industry yang menjual produk dan layanan kepada pelanggan pemerintah dianggap berisiko tinggi. Identifikasi dari Transparency International industry yang berisiko tinggi tersebut termasuk industry minyak dan gas, kehutanan, pertambangan, pertahanan, Konstruksi, dan telekomunikasi. Dengan keberagaman suatu

perusahaan di industri yang high atau low risk tentu akan mempengaruhi bagaimana komitmen dan pengungkapan informasi mereka terhadap program anti korupsi. (Tirtasari&Hartomo, 2019).

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian, Tahun dan judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Iriene Dyah Ayu Tirtasari dan Octavianus Digdo Hartomo (2019) Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi	variabel yakni independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional dan keberagaman gender dalam anggota komisaris.	Analisis Regresi Logistik metode purposive sampling	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Variabel kompetensi komite audit dan kepemilikan institusional

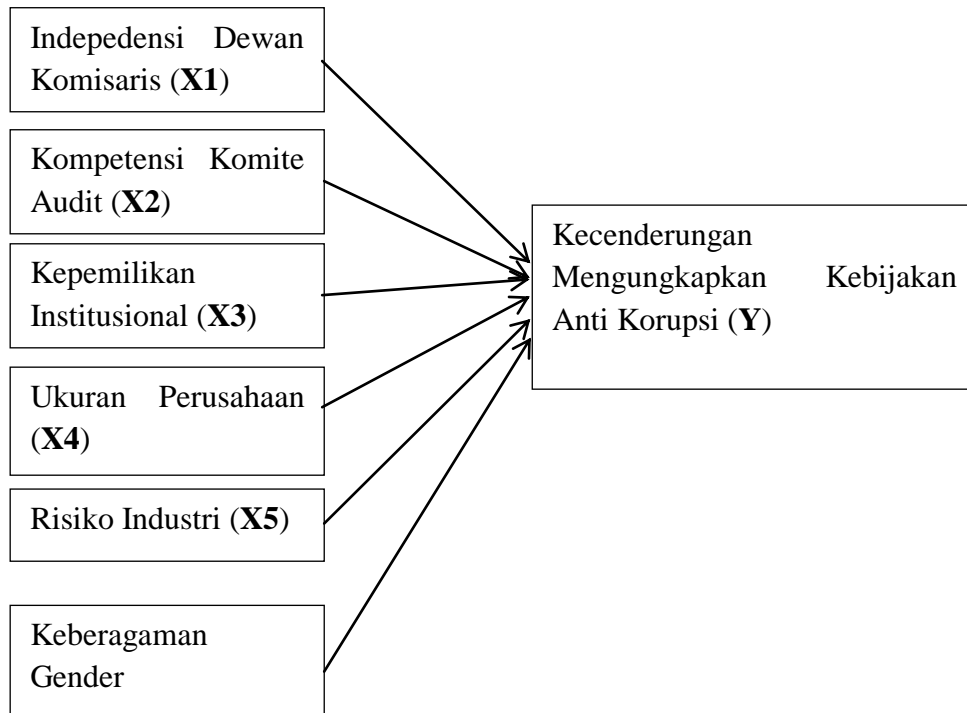
				tidak berpengaruh terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Sedangkan risiko industri berpengaruh negatif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan.
2	Iriene Dyah Ayu Tirtasari (2019) Pengaruh Elemen Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia	variabel yakni independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional dan keberagaman gender dalam anggota komisaris.	Analisis Regresi Logistik Metode purposive sampling	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti

				<p>korupsi diperusahaan Variabel kompetensi komite audit dan terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi diperusahaan. Sedangkan risiko industri berpengaruh negative terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan.</p>
3	<p>Pulkeria Chandrika Florentiarum (2020) Pengaruh Perusahaan Terhadap Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia Sektor Finansial</p>	<p>Variabel Yaitu Indepedensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan</p>	<p>Regresi Linier Berganda.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indepedensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan pemerintah, dan</p>

		<p>institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, kepemilikan pemerintah, dan tata kelola perusahaan itu sendiri.</p>	<p>tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder tidak berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi.</p>
--	--	--	---

2.11 Kerangka Pemikiran

Berikut penulis sajikan kerangka pikir dalam penelitian ini



2.13 Pengembangan Hipotesis

2.13.1 Pengaruh Indepedensi Dewan Komisaris Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi

Komisaris Independen dalam komposisi Dewan Komisaris akan menimalkan konflik kepentingan dan juga intervensi dari pihak manapun, sehingga pengambilan keputusan oleh direksi dilakukan secara objektif. Sebagai pihak yang tidak mempunyai intervensi atau konflik kepentingan di dalam perusahaan, komisaris indepedensi hanya berfokus pada kelangsungan hidup perusahaan dan memastikan perusahaan dikelola dengan baik. Komisaris independen hanya berfokus pada kelangsungan hidup perusahaan dan memastikan perusahaan dikelola dengan baik. Komisaris independen akan mendorong pihak manajemen melakukan upaya untuk meningkatkan lingkungan bisnis yang bersih dan sehat dengan melakukan pengungkapan informasi yang akan memberi feedback baik bagi perusahaan tersebut. Maka komisaris independen akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan upaya-upaya demi tercipta tata kelola yang baik dan

berkelanjutan usaha, salah satu upayanya yaitu mendorong kecenderungan untuk mengungkapkan komitmen perusahaan untuk melawan korupsi, dalam bentuk kebijakan anti korupsi. Salah satu upaya pelaporan yang dilakukan adalah dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan sebagai bentuk pencegahan dan juga komitmen perusahaan terhadap shareholder dan pemangku kepentingan lainnya. Dapat dikatakan semakin independen dewan komisaris akan mendorong kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Penelitian (Tirtasari & Hartomo, 2019) menyatakan bahwa Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Independensi Dewan Komisaris dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan mengungkapkan kebijakan anti korupsi

2.13.2 Kompetensi Komite Audit

Tugiman (1995) menyatakan anggota komisaris audit disamping harus ahli di bidangnya juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing serta mengetahui dan menguasai analisa laporan keuangan. Kompetensi akuntansi atau keuangan yang dimiliki komite audit diharapkan semakin mendorong transparansi pelaporan keuangan yang merupakan salah satu cerminan perilaku anti korupsi. Kompetensi akuntansi dan keuangan yang dimiliki komite audit diharapkan semakin mendorong transparansi pelaporan keuangan yang merupakan salah satu cerminan perilaku anti korupsi. Dengan demikian semakin kompeten komite audit dibidang akuntansi atau keuangan berkorelasi dengan semakin tingginya kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Penelitian (Tirtasari & Hartomo, 2019) Komite audit yang dimiliki kompetensi di bidang keuangan akan memacu pihak manajemen dan audit eksternal meningkatkan kualitas laporannya, yang tentu akan berdampak pada peningkatan pelaporan kebijakan perusahaan mengenai anti korupsi dan mengurangi biaya agensi. Penelitian (Tirtasari & Hartomo, 2019) menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap

kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Komite Audit dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

2.13.3 Kepemilikan Institusional

Keberadaan kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendukung praktik anti korupsi di perusahaan sebab kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Pemilik saham institusional akan mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan sebagai suatu upaya pencegahan dan bentuk komitmen perusahaan anti korupsi. Pengungkapan anti korupsi di perlukan karena korupsi merupakan permasalahan krusial dan apabila terjadi dalam sebuah bisnis tentu akan mempunyai dampak kerugian yang luar biasa bagi investor institusional tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tingginya jumlah kepemilikan institusional maka akan semakin memperketat pengawasan dan mendorong pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan sebagai wujud asas transparansi serta komitmen perusahaan untuk mengurangi korupsi. Penelitian (Tirtasari & Hartomo, 2019) menyatakan bahwa ada korelasi positif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan perusahaan. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3 : kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

2.13.4 Ukuran Perusahaan

Semakin besar perusahaan tentu semakin besar jaringan relasi dengan berbagai pihak. Selain perusahaan besar akan lebih mendapatkan perhatian khusus dari publik atau dengan kata lain lebih menjadi sorotan publik. Maka untuk tetap menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan public perusahaan besar akan

melakukan upaya pembuktian bahwa kegiatan bisnis yang berlandaskan etika kejujuran dan mengungkapkan segala informasi mendukung. Korupsi menjadi ancaman besar bagi dunia bisnis sebab apabila perusahaan besar melakukan korupsi maka pemberitaannya akan lebih disorot oleh masyarakat dan menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Penelitian (Tirtasari & Hartomo, 2019) yang memaparkan bahwa perusahaan yang besar cenderung menerima lebih banyak perhatian dari masyarakat umum dan kondisi ini menyebabkan perusahaan berada dibawah tekanan publik yang lebih besar untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya, salah satunya adalah dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. (Tirtasari & Hartomo, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

2.13.5 Risiko Industri

Hasil identifikasi Transparency International yang dimuat dalam jurnal Healy dan Sarafeim (2011) industri yang termasuk high risk tersebut termasuk minyak gas, kehutanan, pertambangan, pertahanan, konstruksi, dan telekomunikasi. Perusahaan yang berada dalam kategori high risk akan lebih terdorong mempunyai upaya yang lebih untuk melakukan pengungkapan mengenai kebijakan anti korupsi. Dengan adanya pengungkapan ini dapat mencegah perilaku korupsi di perusahaan dan memperoleh kembali kredibilitas dari publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa industri dengan risiko yang tinggi akan semakin terdorong melakukan upaya anti korupsi di perusahaan dalam jurnalnya menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang tinggi tingkat korupsinya, dan dapat melakukan pengungkapan yang luas dari upaya anti korupsi untuk mengkomunikasikan komitmen kepada pemangku kepentingan dan juga mengurangi risiko. Penelitian (Tirtasari & Hartomo, 2019) menyatakan bahwa

risiko industry berpengaruh negative terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Maka hipotesis daalam penelitian ini adalah:

H5 : Risiko industry dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

2.13.6 Keberagaman Gender

Menurut Marzuki (2007) gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalis, emosi, serta faktor-faktor non biologis lainnya. Adapun definisi lain yang diungkapkan oleh Puspitawati (2013) yang menyatakan bahwa keberagaman gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan yang terjadi karena adanya proses sosialisasi yang dialami secara terus menerus atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *gender* akan membentuk perilaku seseorang berkaitan dengan bagaimana mereka berfikir dan bertindak. Pada dasarnya perempuan dianggap lebih memiliki sikap kehati-hatian dan tidak ingin mengambil risiko sehingga keputusan yang diambil dinilai cukup tepat dan risiko rendah. Adanya dewan komisaris perempuan dalam jajaran anggota komisaris tentu akan mempengaruhi bagaimana upaya perusahaan untuk mencegah korupsi. Penelitian (Tirtasari & Hartomo, 2019) menyatakan bahwa Keberagaman *Gender* dalam komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

H6 : Keberagaman Gender dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data tersebut adalah data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs <http://www.idx.co.id>. Dan sumber lainnya berasal berasal dari sumber bacaan seperti Jurnal, Google scholar, dan data dari Internet.

3.2 Metode Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik (dokumentas). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri laporan keuangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang mejadi sampel dan data-datanya yang berperanguh terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Selain itu metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang melakukan pencatatan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2007:62), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive sampling*. *Purposive sampling*

Yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan atau kriteria tertentu. Adapun Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018-2020.
2. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan Laporan Tahun berturut-turut tahun 2018-2020.
3. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan satuan mata uang rupiah selama periode 2018-2020.
4. Laporan tahunan yang tidak menyajikan data mengenai data kompetensi komite audit.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel penelitian

Menurut Sugiyono(2017), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari variasi tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan Variabel Dependen, Variabel Independen dan Variabel Kontrol yang digunakan yaitu:

1. Variabel Tidak Bebas/Dependen (Y)

Menurut sugiyono (2017), variabel depende dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam Penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Kecenderungan Megungkapkan Kebijakan Anti Korupsi.

2. Variabel Bebas/Indenpenden (X)

Menurut Sugiyono (2017), variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

dependen Terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang akan diteliti adalah Independensi dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Risiko Industri, Keberagaman gender.

3. Variabel Kontrol

Menurut Sugiyono (2017) adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut (sugiyono,2015, h.38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dan dapat dilakukan dengan tepat.

3.4.3 Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi

Menurut (depende) dalam penelitian ini adalah pengungkapan kebijakan anti korupsi. Pengungkapan anti korupsi merupakan aspek penting yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk mencegah, memantau, dan membrantas korupsi. Dissanayake (2011) dalam Joseph et al., (2016). pengungkapan kebijakan anti korupsi adalah sebuah mekanisme untuk mencegah perilaku atau tindakan yang tidak etis seperti korupsi, yang kaitannya dengan praktik CSR untuk organisasi laba. Variabel ini diukur menggunakan *dummy*, dimana perusahaan yang memiliki kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi akan diberi skor satu (1) sedangkan perusahaan yang memiliki kecenderungan tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi akan diberi skor nol (0).

3.4.4 Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris Independen menurut (Agoes dan Ardana) (2014:110) adalah komisaris dan direktur independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham minoritas dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Variabel ini diukur menggunakan perbandingan antara anggota dewan komisaris yang independen dengan keseluruhan anggota dewan komisaris. Variabel ini disimbolkan dengan KI. Perumusannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

3.4.5 Kompetensi Komite Audit

Komite audit sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau melakukan tugas-tugas khusus (Tugiman, 1995). Variabel ini diukur dengan menggunakan pembagian proporsi jumlah komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan dengan keseluruhan jumlah komite audit di perusahaan tersebut. Variabel ini di simbolkan dengan KA. Perumusannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah komite audit yang berkompeten}}{\text{Jumlah seluruh komite audit}}$$

3.4.6 Kepemilikan Institusional

Menurut (Gumilang,) dkk (2015) kepemilikan institusional merupakan suatu keadaan ketika saham mayoritas suatu perusahaan dimiliki oleh sebuah lembaga

seperti, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Variabel ini diukur dengan mencari perbandingan saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Variabel ini di simbolkan INST. Perumusannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3.4.7 Ukuran Perusahaan

Menurut (Brigham dan Houston) (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai total asset perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total asset perusahaan. Ukuran perusahaan = Ln x Total Aset alasan penggunaan ukuran perusahaan dalam penelitian ini, karena ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dihitung. Variabel ini disimbolkan dengan LnSSET.

3.4.8 Risiko Industri

Risiko Industri dapat diartikan suatu keadaan atau faktor yang mungkin memiliki dampak pada suatu perusahaan. Risiko industri merupakan risiko yang dimiliki suatu perusahaan yang menyebabkan terjadinya intensitas kegiatan industri. Industri yang berisiko *high risk* (Tinggi) dan industri yang berisiko *low risk* (rendah). Menurut Transparency international industry minyak, gas, kehutanan, pertambangan, pertahanan, konstruksi, dan telekomunikasi. Variabel ini menggunakan variabel dummy dimana (1) termasuk dalam industri tinggi dan (0) perusahaan termasuk dalam industri rendah. (Tirtasari&Hartomo, 2019) Variabel ini disimbolkan dengan INDSTR.

3.4.9 Keberagaman Gender dalam Anggota Komisaris

Menurut World Health Organization (WHO), Gender adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksi secara sosial. Artinya bahwa, yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah mengenai peran perempuan dalam anggota komisaris dalam mendorong upaya mengungkapkan kebijakan anti korupsi. (Tirtasari&Hartomo, 2019) Variabel ini menggunakan perbandingan jumlah perempuan dari keseluruhan jumlah anggota komisaris, variabel dapat disimbolkan GENDER. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggota komisaris perempuan}}{\text{Jumlah seluruh anggota komisari}}$$

3.5 Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis untuk dapat memberikan jawaban dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan program *SPSS for Windows Versi 20* untuk mengolah data. Penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan penjelasan dan berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan varian kelompok melalui rentang dan simpangan baku. (Ghozali;2015).

3.5.2 Uji Hosmer-Lemeshow

Kelayakan model regresi dinilai berdasarkan hasil uji Hosmer-Lemeshow Goodness of fit Test. Penilaian terhadap regresi ini dilakukan dengan melihat output dari Hosmer-Lemeshow dengan hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati

H_1 : Terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati

Dengan dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai goodness of fit test yang diukur dengan nilai Chi-Square. Dasar keputusan uji homser-lemeshow adalah p-value $> 0,05$ maka tidak ada perbedaan yang nyata antar model dengan dengan data (model mampu memprediksi nilai data) sedangkan jika p-value $< 0,05$, maka terdapat perbedaan yang nyata antara model dengan data (model tidak mampu memprediksi nilai data).

3.5.3 Uji Rasio Likelihood

Model regresi logistic untuk dataset yang sama dengan model regresi kedua tersarang dalam model pertama. Maka model pertama dinamakan model lengkap (*full model*), sedangkan model kedua dinamakan model tereduksi (*reduced model*).

Uji statistika untuk memperbandingkan kedua model tersebut dapat dilakukan dengan uji rasio likelihood. Jika model pertama memiliki fungsi likelihood-2 $\ln L_1$ dengan $(p + k)$ parameter dan model kedua memiliki fungsi likelihood-2 $\ln L_2$ dengan p parameter, maka statistika pengujinya adalah:

$$LR = -2 \ln L_1 - (-2 \ln L_2)$$

Yang berdistribusi khi-kuadrat dengan derajat bebas $(p + k) - p = k$.

Seandainya hasil uji statistika tidak menunjukkan perbedaan antara model lengkap dengan model tereduksi, maka berdasarkan prinsip parsimony yang dipilih adalah model terekduksi.

3.5.4 Analisis Regresi Logistik

Regresi Logistic digunakan karena data dependen dalam penelitian ini pengkategorian. Pengkategorian yang dimaksud adalah variabel pengungkapan kebijakan anti Korupsi disajikan dalam dua kategori yaitu perusahaan yang memiliki kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan perusahaan

yang memiliki kecenderungan tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Model regresi yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{p}{p-1} = \alpha 0 + \beta 1 KI + \beta 2 KA + \beta 3 INST + \beta 4 LNASSET + \beta 5 INDSTR + \beta 6 GENDER + e$$

Keterangan:

$\ln \frac{p}{p-1}$	= Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi (1= Kecenderungan Mengungkapkan kebijakan Anti Korupsi; 0= Kecenderungan tidak mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi)
$\beta 1 - \beta 6$: Koefisien Variabel Independen
KI	: Independensi Dewan Komisaris
KA	: Kompetensi Komite Audit
INST	: Kepemilikan Institusional
ASSET	: Logaritma natural aset
INDSTR	: Risiko Industri
GENDER	: Keberagaman dalam anggota komisaris

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi majemuk (R²) yang diantara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independe memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Sebaliknya, jika nilai yang diperoleh adalah 0 maka variabel independen tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. (Ghozali,2015).

3.5.3.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak yang menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ketentuan yang digunakan dalam uji F

adalah sebagai berikut: (Ghozali,2015) Tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% Kriteria pengujian yang digunakan yaitu :

- a. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 ;maka model yang digunakan dikatakan layak.
- b. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05; maka model yang digunakan dikatakan tidak layak.
- c. Jika nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F table, maka model penelitian sudah layak.

3.5.3.3 Uji T (T-Test)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut: (Ghozali,2015).

- a. Pada uji ini, suatu variabel independe merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas signifikannya dibawah 5%
- c. Jika hitung $>$ t table, maka H_a diterima. Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_a ditolak.